



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PAMUDJI SANTOSO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 776269

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 620.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m²/21 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m²/36 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m²/21 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 250 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 138.000.000

1. MOBIL, MAZDA SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, GRAND LIVINA NIAGA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOPI Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, YAMAHA B6H-F A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 23.737.569



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	781.737.569
III. HUTANG	Rp.	257.955.755
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	523.781.814

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.